

**KONTRIBUSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM
MENINGKATKAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA
(KB) DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**FAUZAN MAULANA
NIM. 411307037
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

SKRIPSI

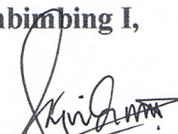
**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh

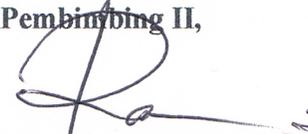
**FAUZAN MAULANA
NIM. 411307037**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Fajri Chairiwati, S.Pd.I., M.A.
NIP. 19790330 200312 2 002

Pembimbing II,


Arif Ramdan, S.Sos.I., M.A.
NIP. 203 107 8001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**FAUZAN MAULANA
NIM. 411307037**

Pada Hari/Tanggal

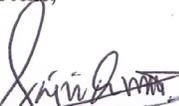
**Selasa, 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awwal 1439 H**

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

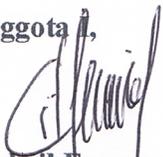
Ketua,


**Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A
NIP. 19790330 200312 2 002**

Sekretaris,


**Arif Ramdan, S.Sos.I., M.A
NIP. 203 107 8001**

Anggota I,


**Syahril Furqany, M.I. Kom
NIP. 132 804 8901**

Anggota II,


**Taufik, SE. Ak., M. Ed
NIP. 19770510 200901 1 013**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 19641220 198412 2 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fauzan Maulana

NIM : 411307037

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 09 Januari 2018

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN BANGSA
TGB
73B49ACF059846150
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Menyatakan,

Fauzan Maulana
NIM. 411307037



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh**”. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Dakwah dan Penyiaran Islam, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang telah mendukung dari awal perkuliahan dan memotivasi dalam terselesainya tugas akhir ini, kepada Ayahanda tercinta Adi Putra Abdullah dan ibunda tersayang Fatmawati, serta abang dan adik tersayang.
2. Ibu Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Arif Ramdan, S.Sos.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, bimbingan dan saran dalam persiapan penulisan proposal sampai terselesaikannya tugas akhir ini.

3. Dr. Hendra Syahputra, ST., MM. selaku Ketua Jurusan KPI.
4. Drs. H. A. Karim Syeikh, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa.
5. Seluruh staf pengajar Jurusan KPI serta Fakultas Dakwah dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry beserta jajarannya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada teman-teman jurusan KPI yang tak bisa disebut satu persatu, untuk teman-teman KPM, dan yang terspesial yang telah menyemangati dan membantu saya dari awal sampai akhir Minnie, S.Si.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Konsep	9
BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penduduk	10
1. Pengertian Penduduk	10
2. Penyebaran Penduduk	11
3. Permasalahan Kependudukan	13
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
C. Teori Komunikasi Organisasi	17
D. BKKBN	19
1. Sejarah BKKBN	19
2. Tujuan BKKBN	20
3. Tugas dan Fungsi BKKBN	21
E. Keluarga Berencana (KB)	22
1. Pengertian Keluarga Berencana (KB)	23
2. Pendapat Ulama yang Setuju tentang Keluarga Berencana (KB)	31
3. Pendapat Ulama yang Bertentangan tentang Keluarga Berencana (KB)	34
4. Sosialisasi Keluarga Berencana (KB)	40
5. Iklan dan Baliho Keluarga Berencana (KB)	41
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	45

A. Metode Penelitian	45
B. Subjek Penelitian	46
C. Informan Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	49
2. Dokumentasi	50
E. Sumber Data dalam Penelitian	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum BKKBN Aceh	53
1. Sejarah	54
2. Visi dan Misi	55
3. Struktur Organisasi	60
B. Hasil Penelitian	61
1. Kontribusi BKKBN dalam Menyampaikan Informasi KB di Kota Banda Aceh	61
2. Kendala-kendala yang Dihadapi BKKBN dalam Menyampaikan Informasi KB di Kota Banda Aceh	68
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Pembimbing Skripsi.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Foto Dokumentasi BKKBN

Lampiran 4. Foto Sidang Munaqasyah

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi tentang *Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana di kota Banda Aceh*. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Penelitian ini dilaksanakan di BKKBN kota Banda Aceh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh selama tiga minggu penelitian di BKKBN kota Banda Aceh, didapatkan hasil bahwa banyaknya upaya yang dilakukan oleh BKKBN memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah peserta KB di kota Banda Aceh selama tiga tahun terakhir (2015-2017). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN untuk terus meningkatkan jumlah peserta KB adalah dengan cara melakukan sosialisasi, bermitra kerja dengan beberapa instansi terkait guna untuk menambah informasi tentang program KB tersebut kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh. Selama melakukan penyuluhan tentang program KB kepada masyarakat, BKKBN belum menemukan kendala apapun. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kota Banda Aceh sudah paham mengenai betapa pentingnya ber-KB.

Kata Kunci: BKKBN, KB, Kontribusi, Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu selama lebih kurang enam bulan dengan tujuan menetap. Menurut UU.RI.No.10 tahun 1992 menyatakan bahwa penduduk adalah pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar antara 2,15% hingga 2,49% per tahun.¹ Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besarnya mencapai 259.940.857 juta jiwa terhitung 31 Desember 2010. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan.²

Pertumbuhan penduduk seperti yang dikemukakan di atas dapat menimbulkan berbagai persoalan masalah. Permasalahan yang akan muncul yaitu tidak meratanya kepadatan penduduk antar daerah di Indonesia. Secara ekonomis, permasalahan yang muncul dari kondisi ini adalah, rendahnya produktivitas daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah.³

¹Dyah Noviawati dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), hlm.1-3.

²Endah Sulistyaningsih, *Strategi Sosialisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, e-Journal Ilmu Komunikasi, 2013, Vol 1, hlm.367.

³Dyah Noviawati dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), hlm.4.

Tingkat pertumbuhan penduduk seperti itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Peristiwa kelahiran dan kematian di suatu daerah menyebabkan berubahnya jumlah dan komposisi penduduk. Sedangkan peristiwa perpindahan penduduk dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Selain penyebab langsung seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, terdapat penyebab tidak langsung seperti keadaan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, dsb.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dinyatakan bahwa pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kualitas dan kuantitas dengan daya dukung dan daya damping lingkungan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diselenggarakan pembangunan dan perkembangan untuk meningkatkan kualitas penduduk serta keluarga dan memperbaiki segala aspek dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju.

⁴Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), hlm.1-3.

Gambaran penduduk atau statistik dan data kependudukan sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan, baik di kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Data tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, misalnya digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahannya, persebaran penduduk, dsb.

Selain itu, data statistik kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sosial dan ekonomi penduduk di suatu Negara. Dari segi ketenagakerjaan, misalnya keadaan penduduk dapat dilihat dari persentasenya menurut bidang pekerjaan utama (pertanian, industri, dan jasa), status pekerjaan, atau jenis kegiatan, yang menunjukkan rata-rata lamanya hidup penduduk, sering kali dipakai untuk melihat peningkatan standar hidup.

Statistik kependudukan memegang peranan penting. Penemuan-penemuan baru tentang apa yang terjadi secara empiris akan membentuk teori baru dan teori tersebut akan diuji kembali dengan penemuan data empiris yang terbaru dan demikian seterusnya.⁵

Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan mengenai pertumbuhan kepadatan penduduk adalah dengan mengedepankan program keluarga berencana. Mengenai keluarga berencana sendiri bukanlah hal yang baru, hal ini sebenarnya telah mulai dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu pada masa Mesir kuno, Yunani kuno, Tiongkok kuno, dan India. Akan tetapi cara-cara yang dipakai masih kuno.

⁵Lembaga Demografi UI, *Dasar-dasar Demografi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.1.

Di Indonesia keluarga berencana modern mulai dikenal pada tahun 1953. Pada tahun itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan, dan tokoh masyarakat telah mulai membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah pertumbuhan penduduk. Dan pada tanggal 23 Desember 1957 mereka mendirikan sebuah organisasi dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan metode *silent operation* yang akan membantu masyarakat dengan secara sukarela. Pada tahun ini program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dinilai belum sempurna. Sesuai dengan perkembangan program pembangunan nasional, ditetapkan adanya Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) dengan Keppres No. 25 Tahun 1983 yang bergerak langsung dalam bidang kependudukan, maka dilakukan lagi penyempurnaan mengenai organisasi BKKBN dengan Keppres No. 64 Tahun 1983 dengan tugas pokok adalah menjalankan program secara menyeluruh dan terpadu.⁶

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. BKKBN dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas BKKBN adalah merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.⁷

Maka Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penekanan jumlah angka kelahiran dengan

⁶Dyah Noviawati dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), hlm.11-13.

⁷Dyah Noviawati dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), hlm.22.

pengelolaan dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Pada dasarnya pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah suatu proses pelaksanaan pembangunan yang tujuannya untuk mengatur tingkat kelahiran guna membangun keluarga sejahtera. Keikutsertaan masyarakat yang semakin meluas dalam pengelolaan Program KB dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sehingga menjadikan Program KB Nasional sebagai salah satu sektor yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional dalam proses pengambilan keputusan, informasi manajemen keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai peran yang strategis karena harus menyediakan data dan informasi yang benar, mudah dicerna, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal.⁸

Adapun program-program BKKBN yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial antara lain adalah Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, Program KB bagi Generasi Muda Memasuki Usia Nikah, Program Pelayanan KB bagi Penduduk Miskin, dan lain sebagainya.⁹

Hingga saat ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat miskin yang mulai

⁸Endah Sulistyarningsih, *Strategi Sosialisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, e-Journal Ilmu Komunikasi, 2013, Vol 1, hlm.367.

⁹Andre Kawulur., Salmin Dengo., Sonny Rompas, *Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Administrasi Publik, 2015, hlm.56

membatasi jumlah anak dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Bahkan ada yang rela memberikan anaknya untuk diadopsi oleh keluarga lain yang sulit mempunyai keturunan. Tidak hanya masyarakat miskin saja yang mulai menyadari pentingnya ber-KB, banyak juga masyarakat kalangan menengah ke atas yang sudah menjalankan program KB dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pengamatan penulis, kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber-KB mulai tumbuh dengan adanya upaya dari BKKBN. Hal ini menunjukkan bahwa BKKBN memberikan kontribusi yang sangat penting dalam upaya mengatasi ledakan penduduk. Namun, sosialisasi dari BKKBN ini masih kurang merata ke seluruh pelosok daerah. Sehingga masih banyak saja masyarakat yang tidak ikut serta menjalankan program KB.

Dilihat dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji sejauh mana keberhasilan BKKBN dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) guna mengatasi permasalahan penduduk khususnya di Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum penelitian difokuskan bagaimana kontribusi yang telah dilakukan oleh BKKBN dalam memberikan Informasi mengenai Keluarga Berencana di kota Banda Aceh.

Secara khusus penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan dan usaha yang telah dilakukan oleh setiap orang pada dasarnya pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi apa saja yang telah dilakukan oleh BKKBN agar masyarakat kota Banda Aceh mengikuti program KB guna menghindari peningkatan penduduk.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh BKKBN selama membuat sebuah kegiatan guna mengajak masyarakat kota Banda Aceh agar ingin ber-KB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk BKKBN

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam meningkatkan informasi mengenai Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat dapat mengetahui dampak positif dari ber-KB ini, dan juga dapat mengurangi dampak dari peledakan penduduk yang akan menimbulkan permasalahan sosial seperti, tidak meratanya kepadatan penduduk, ekonomi keluarga, dsb. Demikian dengan mengikuti program KB tersebut masyarakat dapat mencegah terjadinya kepadatan penduduk demi ketentraman masyarakat kota Banda Aceh.

3. Manfaat untuk peneliti

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan mengenai kepadatan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan manfaat ber-KB demi kesejahteraan hidup bermasyarakat.

4. Manfaat untuk jurusan KPI

Ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui bagaimana dampak ke depan, dan menjadikan mahasiswa mengaplikasikan, dan juga mendidik kepada orang-orang yang belum mengetahui dampak peledakan penduduk.

E. Penjelasan Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang harus peneliti definisikan secara operasional, yaitu Kontribusi BKKBN dan Manfaat program KB.

1. Kontribusi BKKBN

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dibawah lembaga pemerintah non-departemen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, demi kesuksesan program-program yang telah ditetapkan oleh pihak BKKBN tidak lain juga dari masyarakat yang harus lebih antusias bersama-sama melakukan yang terbaik bersama BKKBN demi kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan guna untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah bangsa diharapkan dapat menerima norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang bertujuan untuk pertumbuhan yang seimbang.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penduduk

Penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama minimal enam dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.¹⁰

1. Pengertian Penduduk

Pada hakekatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi umur, jenis kelamin dan lain-lain, tetapi juga klasifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi.

Penduduk adalah orang dalam kedudukannya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.¹¹

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan orang yang secara hukum berhak

¹⁰Sri Moertiningsih dan Omas Bulan, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.2.

¹¹Dyah Noviawati dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Jogjakarta: Nuha Offset, 2011), hlm.2.

tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di suatu tempat. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu misalnya pohon bakau yang terdapat pada hutan bakau, atau kera yang menempati hutan tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat, misalnya kursi dalam suatu gedung sekolah. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya.¹²

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

2. Penyebaran Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan di pengaruhi oleh jumlah bayi yang

¹²Ruslan H. Prawiro, *Kependudukan (Teori, Fakta, dan Masalah)*, (Jakarta: Alumni, 1981), hlm.3.

lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur.

Ada tiga faktor lain yang sering di masukan sebagai unsur integral dari sistem kependudukan yakni:

1. Struktur penduduk, yaitu : distribusi umur dan jenis kelamin
2. Komposisi penduduk, yaitu ciri-ciri sosio demografi penduduk yang luas lingkupnya, antara lain status perkawinan, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan atau agama
3. Distribusi penduduk, yaitu persebaran dan lokasi penduduk dalam suatu wilayah tertentu.¹³

Penyebaran penduduk di dunia secara umum menurut geografi tidak merata. Pada tahun 1998, jumlah penduduk dunia sebanyak 5,9 miliar. Lebih dari separuh penduduk, yaitu 3,6 miliar bertempat tinggal di Benua Asia, sementara sisanya tersebar di Benua Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor alam (kesuburan tanah dan iklim), social dan ekonomi (ketersediaan sarana dan prasarana), serta faktor budaya dan politik. Pada akhirnya, persoalan ini kadang menimbulkan masalah yang serius bagi pemerintah dan penduduknya, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan yang terbatas.

Di Indonesia, penyebaran penduduk secara geografis juga tidak merata. Pada tahun 1995, sekitar 60% penduduk menghuni Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9%

¹³Goldscheider dan Calvin, *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial (terjemahan)*, (California: Universitas California Barkley, 1969), hlm.102.

dari luas daratan Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan (pulau terbesar) yang luasnya 28,1% dari luas seluruh wilayah Indonesia hanya dihuni oleh 5,4% penduduk.

Penyebaran penduduk yang tidak merata juga dapat dilihat berdasarkan administrasi pemerintahan. DKI Jakarta yang menjadi pusat administrasi pemerintahan memiliki penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa ibu kota adalah tempat yang tepat untuk mencari pekerjaan.¹⁴

Persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan beberapa masalah, di antaranya kelebihan penduduk di pulau jawa dan madura yang terwujud sulitnya angkatan kerja mendapat pekerjaan, pendapatan penduduk yang rendah dan angka pengangguran meningkat. Di luar jawa banyak sumber daya alam yang belum sempat di jajah oleh manusia. Di pulau jawa proses pemiskinan terjadi karena terlalu padatnya penduduk. Sebaliknya, di luar pulau jawa pemiskinan di sebabkan kekurangan penduduk.¹⁵

3. Permasalahan Penduduk

Pertambahan penduduk adalah jumlah penduduk di akibatkan karena jumlah kelahiran yang ternyata jauh melebihi jumlah kematian. Selain itu mungkin di sebabkan karena sarana pengendalian risiko kematian kian lama kian berhasil di tingkatkan sedangkan penurunan angka kelahiran yang sangat lambat. Selain itu

¹⁴Sri Moertiningsih dan Omas Bulan, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.39.

¹⁵Siswono Yudohusodo, *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1998), hlm. 47.

pertambahan penduduk mungkin juga di tujukan untuk mencapai pertumbuhan alamiah dengan cara meningkatkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Sudah tentu pertumbuhan alamiah merupakan sumber pertumbuhan di dunia sebagai suatu keseluruhan dan mungkin juga di beberapa daerah tertentu.

Kependudukan merupakan masalah nasional yang berdampak kepada masyarakat luas, di satu sisi bahwa penduduk yang besar merupakan modal dalam pembangunan, karena di situ terdapat jumlah angkatan kerja yang cukup besar pula. Di lain pihak bahwa penduduk yang besar merupakan beban pemerintah dalam kaitannya kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Oleh karena itu sejak anak-anak usia sekolah telah di pelajari masalah kependudukan, yang termasuk ke dalam kelompok bidang studi IPS tersebut adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang di dasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sejarah.¹⁶

Perkembangan penduduk yang cepat menimbulkan berbagai masalah antara lain kesenjangan penghasilan pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya kebutuhan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut subsidi untuk kesejahteraan sosial memegang peranan penting untuk mengurangi perbedaan di kota dan di desa sebagai strategi yang di arahkan untuk percepatan pertumbuhan sosial ekonomi dan modernisasi, dan keseimbangan wilayah. Disebutkan pula bahwa seperti daerah perkotaan, dengan kecepatan perkembangan penduduk akibatnya lahan tempat tinggal semakin sempit, sempitnya tempat tinggal tersebut akhirnya menjadi perkampungan yang kumuh, sulit

¹⁶Depdikbud, *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tenggul Landas*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), hlm.151.

untuk dilakukan pengaruh pengaturan secara baik, kepedulian masyarakat semakin berkurang pula.

Besar kecilnya laju penambahan penduduk di suatu wilayah sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya komponen pertumbuhan penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya kalau ada bayi lahir dan penduduk yang akan datang dan penduduk akan berkurang jumlahnya kalau ada penduduk yang mati dan yang meninggalkan wilayah tersebut.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Literatur yang membahas tentang pergaulan bebas remaja diantaranya adalah skripsi berjudul “Persepsi Remaja Terhadap Hubungan Interpersonal Laki-laki Dan Perempuan (Studi di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Dalam skripsi ini membahas tentang hubungan antar manusia terutama dalam hubungan laki-laki dan perempuan mempunyai batasan atau aturan tersendiri dalam Islam, begitu juga dalam kehidupan remaja dalam melakukan hubungan sesamanya antara laki-laki dan perempuan. Namun kenyataannya hari ini banyak remaja yang bergaul bebas tidak dilandasi dengan aturan pergaulan yang diatur Islam. Penelitian ini meneliti tentang persepsi remaja terhadap hubungan laki-laki dan perempuan pada remaja yang ada di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tujuan penelitian sebelumnya untuk mengetahui persepsi remaja di SMA dan MAS yang ada di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap hubungan interpersonal laki-laki dan perempuan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang beranjak pada fakta di lapangan

dengan merujuk pada landasan teoritis yang ada, juga melengkapi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan angket dan observasi, teknik pengambilan sampel secara acak.¹ Literatur berikutnya membahas tentang sosialisasi bahaya HIV dan AIDS terhadap remaja efek dari seks bebas dan suntikan yaitu “optimalisasi peran komisi penanggulangan AIDS kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya HIV dan AIDS terhadap remaja”. Dalam skripsi ini membahas tentang penyebab penularan HIV dan AIDS.¹⁷

Virus ini hanya bisa tertular melalui kontak langsung dengan darah, cairan sperma dan cairan vagina, dipercepat oleh penggunaan jarum sunti yang tidak steril, transfusi darah, donasi organ tubuh dan perilaku seksual yang tidak aman. Kekhawatiran peneliti pada remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang sering melakukan seks bebas dan memakai narkoba sejenis suntikan akan mudah terkena HIV dan AIDS. Untuk menghindari dari masalah tersebut peneliti ini meneliti tentang peran komisi penanggulangan AIDS kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya AIDS terhadap remaja, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung KPA Banda Aceh dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

¹⁷Hendri Saputra. *Persepsi Remaja Terhadap Hubungan Interpersonal Laki-Laki Dan Perempuan (Studi di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2016), hlm.18.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian berfokus pada komisi penggulangan AIDS Banda Aceh serta siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh.¹⁸

Dari kedua penelitian yang berbeda yang diuraikan di atas, penelitian mengenai tempat, judul dan permasalahan yang tidak sama, tempat yang berbeda dan objeknya juga berbeda. Adapun fokus penelitian yang peneliti ambil adalah fenomena penyalahgunaan alat kontrasepsi (studi kasus pada siswa SMA dan sederajat di kota Banda Aceh).

C. Teori Komunikasi Organisasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau “commo” dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna, “commonness”.

Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam kelompok/organisasi terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah

¹⁸ Munawar A.R, *Optimalisasi Peran Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV Dan AIDS Terhadap Remaja*, (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, 2016), hlm.18-19.

penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan/karyawan.¹⁹

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi timbal balik, untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses dari suatu keinginan masing-masing individu untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kehidupan organisasi tidak mungkin dipisahkan dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif tergantung pada kemampuannya menjawab dan mengantisipasi perubahan lingkungan luar organisasi sesuai dengan perkembangan internal organisasi itu sendiri. Di samping itu dalam komunikasi didasari beberapa perspektif dalam pengembangannya sehingga berperan penting dalam organisasi.²⁰

Teori Hubungan Manusia

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi sosial. Manusia terlibat dalam tingkah laku organisasi. Misalnya anggota organisasi yang memutuskan apa peranan yang akan dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Tanpa manusia organisasi tidak akan ada. Oleh karena itu faktor manusia dalam organisasi haruslah mendapat perhatian dan tidak dapat diabaikan.

Teori hubungan manusia ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Teori ini menyarankan strategi

¹⁹Pace, R. Wayne., Deddy Mulyana, *Komunikasi Organisasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 32.

²⁰Sendjaja, Sasa Juarsa, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), hlm.16.

peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensinya. Dengan meningkatkan kepuasan kerja dan mengarahkan aktualisasi diri pekerja, akan mempertinggi motivasi bekerja sehingga akan dapat meningkatkan produksi organisasi.²¹

D. BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.²²

BKKBN pernah sukses dengan slogan *dua anak cukup*, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati Hak Asasi Manusia, BKKBN memiliki slogan *dua anak lebih baik*. Saat ini, BKKBN kembali dengan slogan *dua anak cukup*.

1. Sejarah BKKBN

Pada tahun 1953, sekelompok kecil masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari kalangan kesehatan, memulai prakarsa kegiatan keluarga berencana. Kegiatan kelompok ini di berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957.

²¹ Dr. Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm 39-40

²²BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm.60.

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto turut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia, dan sejak itulah Program Keluarga Berencana di Indonesia mulai memasuki tahap yang lebih maju. Untuk mengelola Program KB, pada tahun 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Kemudian pada tahun 1970 LKBN diganti dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu suatu badan pemerintah non departemen yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Program Keluarga Berencana secara Nasional.²³

Mula-mula program ditujukan di enam provinsi di Jawa dan Bali, yang merupakan daerah yang terdapat di Indonesia. Di tahun 1974, 10 provinsi lainnya masuk dalam lingkungan program Nasional. Tahun 1974 seluruh Indonesia sudah dapat dicakup dalam program Keluarga Berencana Nasional.

2. Tujuan BKKBN

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993 terbentuk untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dengan tugas pokok BKKBN adalah melanjutkan dan memantapkan program-program KB nasional merumuskan kebijakan umum pengelolaan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara terpadu bersama institusi terkait, unit pelaksana dan pelaksana (BKKBN). Visi BKKBN yaitu “Menjadi Lembaga yang

²³BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm.32

Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Sedangkan Misi BKKBN yaitu :

- a. Mengutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Mengembangkan jejaring kemitraan dan pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

3. Tugas dan Fungsi BKKBN

Tugas BKKBN yaitu merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.

Sedangkan fungsi BKKBN antara lain :

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dengan menyeluruh dan terpadu, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
- b. Koordinasi dan penyelenggaraan manajemen dan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan luar negeri serta pengumpulan data dan informasi keluarga.

- d. Koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- e. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera.
- f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.
- g. Koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.
- h. Koordinasi dan penyelenggaraan pengawasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenangan dan materil, serta pengelolaan program keluarga nasional dan pengempuan keluarga sejahtera.²⁴

E. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana dalam arti sempit adalah upaya pengaturan kelahiran dalam rangka mewujudkan hak-hak pasangan usia subur untuk menentukan kapan akan melahirkan, berapa jumlah anak ideal, jarak anak yang dilahirkan, kapan berhenti untuk tidak punya anak lagi.²⁵

²⁴ BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm.32.

²⁵BKKBN, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm.21

1. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Menurut UU RI tahun 1992, pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinaan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Menurut International Conference on Population and Development (ICPD) ke X di Kairo, KB adalah penginteraksian faktor kependudukan dalam pembangunan melalui program KB, dimaksudkan untuk kualitas penduduk, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, memperbaiki kesejahteraan dan pemberdayaan lansia dan memperbaiki pendidikan serta informasi.²⁶

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Menurut WHO, KB suatu usaha untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau

²⁶BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm.29

alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.²⁷

KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.²⁸

KB adalah sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut.²⁹

Dari beberapa pengertian KB diatas maka dapat disimpulkan bahwa KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat serta lingkungan.

²⁷Affandi, *Kontrasepsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.38.

²⁸BKKBN, *Pedoman Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: BKKBN, 2009), hlm.42

²⁹Suratun, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Info Media, 2008), hlm.19.

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.³⁰

Menurut WHO keluarga berencana adalah tindakan yang bertujuan untuk :

1. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
2. Mengatur interval diantara kehamilan
3. Mengatur waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri
4. Menentukan jumlah anak

Berdasarkan tujuan diatas pemerintah Indonesia pun mencanangkan program Keluarga Berencana yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara populasi dan kebutuhan pokok manusia, artinya dengan program Keluarga Berencana diharapkan mampu mengatur atau menjaga laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Human BKKBN Setia Edi mengungkapkan, penambahan penduduk pada tahun 2010 meningkat hingga 1,49 %, hal ini diakui akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Adapun manfaat KB secara khusus untuk menurunkan angka kematian ibu, dapat meningkatkan upaya kesehatan promotif dalam kesehatan maternal dan pengendalian fertilitas pada tingkat keluarga dan lingkungannya. Sedangkan tujuan secara umum:

³⁰Manuaba, Ida Bagus Gde, *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi. Edisi 2*, (Jakarta : EGC, 2003), hlm.99-102

1. Untuk Ibu
 - a. Perbaiki kesehatan
 - b. Peningkatan kesehatan
 - c. Waktu cukup untuk mengasuh anak
 - d. Waktu cukup untuk istirahat
 - e. Menikmati waktu luang
 - f. Dapat melakukan kegiatan lain
2. Untuk Ayah
 - a. Membuat beban keluarga menjadi lebih ringan (beban pikiran, tanggung jawab, biaya).
 - b. Membuat hubungan suami istri selalu terpenuhi
 - c. Dapat memperhatikan dan mendidik anak menjadi lebih baik
3. Untuk Anak
 - a. Dapat tumbuh wajar dan sehat
 - b. Memperoleh perhatian
 - c. Perencanaan pendidikan yang lebih baik
4. Untuk Keluarga
 - a. Dapat memperkecil biaya santunan untuk melahirkan
 - b. Bisa menabung
 - c. Banyak waktu luang
 - d. Bekerja lebih baik, karena tidak banyak masalah
 - e. Pendapatan bisa diatur untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

f. Keluarga lebih sehat, sejahtera dan bahagia.³¹

Tujuan gerakan KB Nasional adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia.³²

Tujuan keluarga berencana menurut BKKBN adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
2. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan untuk meningkatkan reproduksi.

Berdasarkan tujuan BKKBN dapat disimpulkan bahwa Kerja keras yang dilaksanakan BKKBN secara nasional di tahun 2012 sudah berhasil namun belum maksimal. Karena berdasarkan hasil sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 mengisyaratkan bahwa indikator pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggungjawab BKKBN seperti TFR, ASFR, CPR dan Unmet need belum tercapai.³³

Target indikator Total Fertility Rate - Rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak (TFR) sebesar 2,1 di tahun 2014 baru tercapai 2,6 tahun 2012. Indikator ASFR 15-19 tahun sebesar 30/1000 wanita di tahun 2014, baru tercapai 48/1000 wanita. CPR atau angka pemakaian kontrasepsi sebesar 65 persen di tahun

³¹BKKBN, *Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: BKKBN, 2008), hlm.63

³²Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2008), hlm.90.

³³BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm.27

2014, baru tercapai 57,9 persen. Demikian juga target unmet need (pasangan usia subur ingin KB tetapi belum terlayani) akan ditekan hingga 5 persen tahun 2014 namun kini masih 8,5 persen.

Tujuan KB berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) meliputi:

1. Mewujudkan keserasian
2. Keluarga dengan anak ideal
3. Keluarga sehat
4. Keluarga berpendidikan
5. Keluarga sejahtera
6. Keluarga berketahanan
7. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
8. Penduduk tumbuh seimbang (PTS)

Dalam tataran operasionalnya, negara tidak hanya menggunakan agen-agen pembangunan seperti dokter, bidan, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), paramedis, pegawai negeri, pengurus ormas wanita, anggota PKK, dan dharma wanita, bahkan juga para kiai maupun tokoh agama tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa).³⁴ Tentu saja, yang menarik, dalam hal ini ulama bertugas untuk mengintroduksikan, untuk tidak mengatakan “mengindoktrinasikan”, pemahaman kepada masyarakat ihwal keselarasan program KB dengan ajaran Islam. Para kiai dan tokoh agama diminta memberikan “pencerahan” kepada umat, yang pada intinya menekankan bahwa Islam mendukung program KB, bahwa misi negara untuk menekan jumlah

³⁴Lies Marcoes-Natsir, *Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Cet. 1*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 15.

penduduk adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil-dalil agama yang kerap kali menjadi “senjata” adalah ajaran al-Qur’an tentang “kekhawatiran adanya generasi yang lemah”.³⁵ Kata “lemah” dipahami sebagai rendahnya kualitas SDM, yang kemudian diikuti dengan pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas SDM adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga.

Justifikasi atas program KB yang dicanangkan pemerintah kian kuat dengan adanya rekomendasi dari lembaga fatwa yang dibentuk pemerintah, Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa yang terdiri atas beberapa poin penting, yang mendukung program KB ini.³⁶

Pemerintah sukses menjalankan program yang dimulai sejak tahun 1970-an itu. Kesuksesan Indonesia dalam melaksanakan program KB menjadi isu internasional, sehingga banyak negara lain yang berguru tentang bagaimana penanganan program ini secara baik. Tidak hanya sampai di situ, bahkan kemudian Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Konferensi Nasional Keluarga Berencana (International Conference of Family Planning), di Jakarta pada tahun 1981. Dalam even tersebut, PBB memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara yang paling sukses dalam program KB selama bertahun-tahun.³⁷

³⁵Q.S al-Nisa ayat 9: *“Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan keadaan mereka itu...”*.

³⁶Kamaludiningrat, *Peran dan Tantangan Orangtua dalam Mendidik Anak Sholeh, Berakhlak dan Berkarakter di Era Globalisasi, Cet. 1*, (Yogyakarta: Fapsedu DIY, 2014), hlm.25.

³⁷Euneke Sri Tyas Suci, “Keluarga: Sumber Warisan Nilai, Karakter, dan Kualitas Generasi Berikut,” makalah dalam rangka “Hari Keluarga Nasional” (Harganas), di situs Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), www.himpsi.or.id.

Kesuksesan program KB serta merta pudar seiring tumbangnya rezim Orde Baru dan bergulirnya era reformasi yang membuahkan sistem otonomi daerah. Dengan sistem tersebut, negara tidak lagi totaliter dan sentralistik, karena sebagian besar kebijakan kenegaraan diserahkan otoritasnya kepada daerah (kabupaten/kota). Program KB diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing, apakah akan menjadi program prioritas atau sampingan; apakah kelembagaannya akan sebagai dinas, badan, atau sekadar kantor.³⁸

Pada faktanya, program KB tidak lagi menjadi prioritas. Ia hanya program “sampingan” yang terpaksa diadakan, daripada tidak ada sama sekali. Dengan statusnya yang hanya “sampingan”, maka alokasi dananya pun sangat minim, jauh dari cukup, sehingga program-programnya di lapangan pun minimalis. Dalam kondisi seperti itu, jelas sekali hasil akhirnya akan jauh dari memuaskan. Sehingga, banyak analisis yang memprediksi dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan (tahun 2015-an), akan terjadi baby booming di Indonesia, dikarenakan kurang efektifnya program KB. Sebagai indikasi awal, yang menunjukkan pudarnya program KB, adalah hasil survei data penduduk pada tahun 2010, yang menampilkan angka yang mencengangkan, yakni 237,6 juta jiwa. Saat ini hasil update terakhir 30 Juni 2016 berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia adalah 257.912.349 jiwa. Sebuah angka yang mengejutkan, tetapi sekaligus menyedihkan jika melihat kondisi riil bangsa dan negara kita sekarang dengan aneka problematika nasionalnya. Penduduk terus bertambah, bahkan sangat pesat (di kisaran angka 2,7%, padahal

³⁸Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan PP 41 tahun 2007, hlm.48

sebelum era reformasi di angka 2,3%). Masalah-masalah berat akan menghadang: lingkungan, energi, ekonomi, kapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan.³⁹

Pasca ketumbangan rezim Orde Baru, demokratisasi menyebar ke berbagai sektor. Secara sekilas, program KB adalah sebetulnya pengekan terhadap HAM. Maka berbarengan dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, masyarakat mengalami euphoria kebebasan. Program Orde Baru ditinggalkan, tak terkecuali program KB ini.⁴⁰

2. Pendapat Ulama yang Setuju tentang Keluarga Berencana (KB)

Agama Islam merupakan *Rahmatan lil 'alamin*, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat dikalangan masyarakat Islam saat ini, Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.⁴¹ Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan.

Keluarga Berencana (KB) saat ini sering dipahami hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri menggunakan metode alami, mereka lebih memilih menggunakan alat-alat

³⁹Soeroso Dasar, *KB Mati Dikubur Berdiri; Bunga Rampai Tulisan Program Kependudukan dan KB*, cet. 2, (Bandung: Corleone Books, 2011), hlm. 3.

⁴⁰Nindia Destiani Aska, *Perjalanan BKKBN Dulu dan Kini*, artikel dalam *m.kompasiana.com*.

⁴¹Noor Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: AlMa'arif, 1983), hlm. 42.

kontrasepsi, tetapi masih ada yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman Rasulullah yaitu dengan cara *'azl* (Coitus Interruptus).

Dalam pembaharuan hukum Islam di dunia, hadir seorang tokoh umat Islam yang menonjol yaitu Dr. Yusuf al-Qaradhawi, ia adalah seorang Ulama dan seorang mufti. Ia telah melakukan Ijtihad dalam memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi umat Islam pada era modern ini, termasuk diantaranya mengenai masalah Keluarga Berencana (KB) yang akan dikaji pada penelitian ini.

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai Ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya yaitu mempunyai aktifitas yang besar dan pengaruh yang tidak dapat ditutup-tutupi terhadap masyarakat.

Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi memandang bahwasannya program KB diperbolehkan dengan dasar kebolehan praktek *'azl* (Coitus Interruptus) yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau kebolehan KB juga atas pertimbangan tujuannya yaitu dalam rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4): 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.⁴²

Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah.⁴³

Diantara alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah:

- a. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, hal ini telah dilakukan penelitian dan ceking oleh dokter yang dapat dipercaya.
- b. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang terkadang bias mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Dalam hal ini kepentingan anak meliputi kesehatan dan pendidikannya.
- c. Pembolehan melakukan ‘*azl* yang biasa terkenal dalam *syara*’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui akan hamil dan melahirkan anak baru.⁴⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan program Keluarga Berencana (KB), akan tetapi kebolehan melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan kepada niat yang baik, dalam

⁴²Q.S al-Nisa ayat 9: “Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan keadaan mereka itu...”.

⁴³Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1974), hlm. 15.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Terjemahan), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 272-273.

keadaan tertentu juga dengan cara yang bersifat sementara. Dalam *istinbat* hukumnya tentang KB, Yusuf al-Qaradhawi menggunakan cara pengkiyasan, yaitu dengan cara menyamakan hukum dengan alat-alat kontrasepsi modern saat ini, dan juga memberikan pandangan yang baru dan berbeda terhadap isu Keluarga Berencana (KB) yang pada waktu itu menjadi perbedabatan para pakar hukum Islam, yang mana pemahaman Yusuf al-Qaradhawi mengenai keluarga berencana tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan di Eropa dan Amerika yang saat itu masyarakatnya masih kuat berpaham ortodoksi.

3. Pendapat Ulama yang Bertentangan dengan Keluarga Berencana (KB)

Secara umum pola penolakan program KB sama, yakni menolak dengan basis nilai-nilai atau norma agama, atau mungkin bisa disebut dengan ungkapan lain, “penolakan berbasis agama”. Jika disimak, secara umum argumennya berkuat pada wawasan-wawasan berikut ini :

1. Doktrin “Rizki di Tangan Allah”

Umumnya, orang dengan keberagamaan agama yang kuat cenderung menolak KB ketika yang diajukan oleh pemerintah adalah argumen ekonomis. Kaum beragama menolak KB jika alasannya adalah karena “takut tidak bisa menafkahi”.⁴⁵ Bagi mereka, takut punya anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya pengingkaran pada kekuasaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk- Nya. Apalagi jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sudah pasti jaminan

⁴⁵Sabrur R Soenardi, *Pesan KB dalam Sepotong Sinetron*, majalah *Gemari* edisi Juni 2008, hlm 49

rezekinya akan ditanggung oleh-Nya. Sebab, di dalam kitab suci disebutkan, “Siapa yang bertakwa kepada Tuhan, Dia akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya, dan memberinya rizki dari arah yang tak terduga” (*man yattaqi Allah, yaj'al-lahu makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib*).⁴⁶ Tuhan akan menjamin rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini yang bertakwa kepada-Nya. Ini biasanya dikaitkan dengan doktrin bahwa ketakwaan seseorang, akan menarik berkah Allah dari langit dan bumi.⁴⁷

Selain itu, ada juga teks pendukung lain (al-Qur'an), yang melarang umat Islam (pada zaman Nabi Muhammad SAW) untuk “membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut tidak bisa memberi makan (menghidupi) mereka” (*Wala taqtulu auladakum khasy-yata imlaq*). Sebab kata Allah, “Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu itu), dan juga terutama kepadamu” (*Nahnu narzuqhum wa iyyakum*).⁴⁸ Dengan redaksi serupa tetapi tidak sama, teks lain menyatakan: *Wala taqtulu auladukummin imlaq, nahnu narzuqukum wa-iyahum* (Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut lapar, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu juga terutama kepada mereka).⁴⁹

Program KB dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” anak karena alasan ekonomis (khawatir tidak bisa menafkahi). Sehingga, jika demikian halnya, program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin Al-Qur'an di atas, bahwa kita “tidak boleh membunuh anak karena takut kelaparan”. Orang yang ikut program KB dengan

⁴⁶QS al-Thalaq: 2-3.

⁴⁷QS al-A'raf: 96.

⁴⁸QS Bani Isra'il: 31.

⁴⁹QS al-An'am: 151.

alasan ekonomi berarti tidak percaya pada kebenaran ayat tersebut. Sehingga program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin di atas. Tidak memercayai kebenaran suatu ayat (teks) adalah suatu dosa besar. Kesimpulannya, haram hukumnya mengikuti program KB dengan alasan ekonomi. Kesimpulan seperti itu tentu saja disandarkan pada logika keimanan subyektif, bahwa Allah telah berjanji akan menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Sebagai Zat Yang Maha Besar, Allah pasti tidak akan mengingkari janji-Nya itu.⁵⁰

2. Anjuran tentang Memperbanyak Anak

Selain ayat Al-Qur'an, ada juga dalil lain dari hadis Nabi yang dimaknai justru menentang program pembatasan kelahiran. Ada sebuah riwayat cukup terkenal, dari sahabat Anas bin Malik, katanya: "Rasul SAW menyuruh kami (pemuda) agar menikah, dan melarang keras membiarkan perempuan melajang (tidak kawin). Beliau bersabda: *'Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab, dengan kalianlah umatku jadi lebih banyak (daripada nabi-nabi lain) kelak di hari kiamat'*."⁵¹

Para pendukung natalitas dari kaum Muslim akan bersiteguh dengan klaimnya, mendasarkan pada hadis ini, bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ia juga bernilai eskatologis, karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga

⁵⁰Sabrur R Soenardi, *Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar*, artikel dalam Majalah Rindang, No. 02, Th. XXXIII, September 2007, hlm. 42.

⁵¹HR Ahmad, 3/245, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ada juga hadis pendukung lainnya dari Abu Dawud, al-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, dari Ma'qil Ibn Yasar. Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqh Berdasarkan Hadits*, (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 357.

di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak, sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.⁵²

3. Reproduksi sebagai HAM

Pasca Orde Baru, demokratisasi menguat yang berdampak pada tumbuh suburnya kesadaran akan HAM, yang tentu saja bukan saja hak untuk berpikir dan bertindak dalam ranah umum, tetapi termasuk di dalamnya hak untuk bebas menjalankan dan meyakini ajaran agama tanpa rasa takut. Maka di dalam terang cita dan idealisme HAM, banyak orang yang tidak ikut program KB.

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang

⁵²Sabrur R Soenardi, *Sedikit Anak Banyak Rezeki*, artikel di *HU Bernas*, edisi 4 September 2015, hlm. 4.

menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.⁵³

Dari paparan tersebut, tampak sekali betapa Islam secara tradisional begitu menempatkan hak-hak individual pada kedudukan yang tinggi, sehingga dinamakan sebagai hak dasar (*asas*) serta keharusan untuk memeliharanya, seperti pengertian dalam konsep hak asasi manusia (HAM). *Hifzh al-nasl* dapat diartikan sebagai suatu cita perlindungan atas hak personal seseorang (individu) dalam reproduksi atau regenerasi (keberlangsungan anak turun). Penjabarannya, bahwa seseorang memiliki hak yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun menyangkut reproduksi, baik itu berkaitan dengan jumlah anak yang akan dimiliki atau jarak antar kelahiran. Islam memberi keberpihakan kepada hak-hak individual setiap orang untuk bebas mengatur sendiri reproduksinya, tanpa paksaan atau arahan dari siapapun. Hal ini kompatibel dengan kecenderungan umum masyarakat sekarang yang menolak atau tidak tertarik dengan program KB dengan alasan HAM.

4. KB dan Hukum Kodrat (Sunnatullah)

Wawasan yang dilontarkan dalam konteks ini setidaknya ada dua: *Pertama*, sebuah pandangan tradisional bahwa manusia menjalin hubungan perkawinan, secara kodrati adalah demi memiliki keturunan, bahkan secara lazim dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.⁵⁴ Maka ketika kehamilan dan kelahiran dikontrol atau dicegah, hal itu sama saja melawan atau menyalahi

⁵³Al-Ghazali, *al-Mustashafa min 'Ilm al-Ushul, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 26.

⁵⁴Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Penderitaan, cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 126.

kodrat yang sudah ditetapkan Allah kepada manusia, dan hal ini tentu saja merupakan dosa.

Selain itu, *kedua*, wawasan yang coba diketengahkan adalah bahwa alat kontrasepsi bertentangan dengan kodrat penciptaan, sehingga bisa disebut sebagai “pembunuhan”.⁵⁵ Kata kontrasepsi dibentuk dari *contra* (anti) dan *conception* (penciptaan). Kata “penciptaan” (*conception*) disini merujuk pada peristiwa pertemuan antara sel telur (ovum) dan sel sperma; keduanya menyatu, membentuk sel yang akan bertumbuh yang disebut *zygote*.⁵⁶ Dalam pandangan ini, ketika sperma dan sel telur menyatu, disitulah kehidupan sudah dimulai. Paham inilah, barangkali, yang kemudian melahirkan tuduhan “pembunuhan” itu.

Selain itu, ada dua alat kontrasepsi, persisnya mungkin disebut cara ber-KB, yang metodenya dianggap sebagai bukan saja “menyalahi kodrat”, tetapi lebih dari itu adalah “merusak ciptaan Tuhan”. Yang dimaksud tentu adalah tubektomi/Metode Operasi Wanita (MOW) dan vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP). Dianggap menyalahi kodrat bahkan dalam konotasi yang krusial, karena kedua cara ini menjadikan seseorang (perempuan atau laki-laki) tidak akan punya anak lagi secara permanen, kecuali melalui kanalisasi. Merusak ciptaan Tuhan, karena mekanisme kerjanya: MOW, mengoklusi tuba falopi, yang salah satu pilihannya dengan dipotong

⁵⁵Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Penderdayaan, cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 138.

⁵⁶BKKBN, *Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Pendidik Sebaya*, (Jakarta:BKKBN, 2007), hlm. 36.

(walaupun bisa juga diikat atau dipasang cincin saja); MOP, oklusi (umumnya dipotong) pada vasa deferensia (saluran sperma).⁵⁷

4. Sosialisasi Keluarga Berencana (KB)

Dalam usaha mengatasi ledakan penduduk, pemerintah melalui BKKBN, melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya pengendalian penduduk. Program ini bertujuan menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan cara penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sementara untuk menanggapi permasalahan yang muncul di kalangan remaja, BKKBN memiliki program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan program-program Keluarga Berencana sejak dini bagi kaum remaja.

Pesan-pesan GenRe didifusikan melalui iklan, selain itu pesan-pesan GenRe juga disampaikan dalam wadah GenRe yakni Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dimana sasaran khalayaknya adalah remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja. Keberadaan PIK diharapkan mampu menyampaikan program GenRe, mengingat masih banyak ditemukan kasus pernikahan di bawah umur ideal yang ditetapkan oleh BKKBN (22 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria) dan ancaman permasalahan sosial lainnya (seperti pergaulan bebas, penggunaan NAPZA, HIV/AIDS) yang kini tidak hanya menyerang kota besar tetapi juga sudah merambah ke wilayah pedesaan.

⁵⁷BKKBN, *Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*, (Jakarta: BKKBN, 2013), hlm. 7.

Ada beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam menganalisis program penyuluhan yakni sumber, pesan, saluran dan penerima. Keempat hal tersebut merupakan unsur-unsur komunikasi sebagaimana yang terdapat pada penyuluhan program BKKBN mengenai GenRe.⁵⁸

5. Iklan dan Baliho Keluarga Berencana (KB)

Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak banyak atau orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan merupakan hal yang sering kita jumpai baik media cetak maupun media elektronik. Dan setiap produsen selalu menyuguhkan iklan yang menarik untuk menarik perhatian bagi konsumen. Dengan kata lain, iklan memberitahu kepada banyak orang mengenai barang dan jasa dijual, dipasang di media massa seperti Koran dan majalah atau di tempat-tempat umum.

Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Maka dari itu, iklan berupa proses komunikasi yang memiliki tujuan membujuk atau menarik orang banyak untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pihak yang membuat iklan.

Pengertian iklan menurut para ahli :

1. Kriyantono: Mengemukakan bahwa iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dari sponsor yang jelas

⁵⁸Ban dan Hawkins, *Penyuluhan Sumber Daya Manusia*, (Jogjakarta: Kanisius, 1999), hlm.94.

guna untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar biaya untuk media yang digunakan.

2. Gilson & Berkman: Menurut mereka, iklan adalah media komunikasi persuasif yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan respon dan membantu tercapainya objektifitas atau tujuan pemasaran.
3. Russel & Lane: Mereka berpendapat bahwa iklan ialah suatu pesan yang dibayar oleh sponsor dan disampaikan melalui beberapa media komunikasi massa.
4. Wright: Iklan merupakan sebuah proses komunikasi yang memiliki kekuatan yang sangat penting sebagai alat pemasaran yang sangat membantu dalam menjual barang, memberikan layanan dan gagasan melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi persuasif.

Dalam sebuah iklan terdapat unsur-unsur penting yang dapat membedakan iklan dengan bentuk komunikasi lain seperti gagasan, barang dan jasa, non-personal, sponsor dan pembayaran. Iklan dibuat dengan tujuan untuk mengeksplor dan mengenalkan barang atau jasa kepada khalayak ramai atau masyarakat umum dan mempengaruhinya agar produk yang diiklankan tersebut menarik masyarakat untuk mencoba maupun membelinya.⁵⁹

Salah satu teknik penyebarluasan gagasan secara massif dan memiliki jangkauan luas adalah iklan. Menariknya, iklan layanan masyarakat memiliki karakteristik berbeda dengan iklan komersial. Pengukuran keberhasilan iklan komersial salah satunya dapat dilihat dari tingkat penjualan produk atau jasa. Iklan

⁵⁹Anna, L. K, *KB Diabaikan, Jumlah Penduduk Melonjak*, (Online file, 2010).

layanan masyarakat (ILM) menjadi sangat cair dan tidak berwujud karena iklan berisi pesan berupa gagasan atau ide seperti gagasan menikah pada situasi yang tepat, memiliki anak cukup dua orang, atau bahkan gagasan untuk mengatur jarak kelahiran anak.

Gagasan KB yang disampaikan melalui iklan tidak dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan gagasan keluarga berencana ditolak, antara lain keyakinan lokal yang dianggap bertentangan dengan program KB adalah “*banyak anak banyak rezeki*”. Keluarga dengan pendidikan rendah cenderung masih memiliki keyakinan tersebut dengan harapan kelahiran anak-anak dapat membantu masalah ekonomi. Pada keluarga miskin juga menunjukkan eksploitasi tenaga anak-anak untuk pemenuhan ekonomi dengan bekerja pada usia dini. Keyakinan local lainnya adalah system kekerabatan patriarki yang masih menganggap nilai anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Anggapan ini memicu keluarga untuk melahirkan anak laki-laki, walaupun telah memiliki dua anak perempuan sebelumnya. Hambatan selanjutnya adalah kebijakan otonomi daerah yang menyebabkan keterputusan koordinasi dan implementasi program KB secara luas. Hal ini menyebabkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang seharusnya mengedukasi dan memberikan konseling akhirnya terhenti karena tidak ada dukungan.⁶⁰

Baliho adalah sarana ataupun media yang digunakan untuk promosi, mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan

⁶⁰Budisantoso, *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana*, (UNDIP: FKM, 2008), hlm.36-38.

dengan masyarakat umum, selain itu baliho juga dipakai untuk mengiklankan suatu produk baru. Seiring dikenalnya baliho merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi khususnya mesin cetak digital yang semakin modern, semakin canggih. Selain baliho terkadang masyarakat memberikan pamphlet, brosure, Bulletin, Majalah dan masih banyak lagi yang lainnya.

Fungsi dan Manfaat Baliho, antara lain:

1. Menyampaikan materi iklan,
2. Sebagai media promosi yang mudah untuk dilakukan sebab biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar,
3. Dapat dilakukan secara instant atau promosi kontemporer,
4. Untuk meningkatkan penjualan atau market,
5. Dan untuk meningkatkan pamor atau popularitas suatu produk.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format *grounded research*. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.⁶¹

Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana “*Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana*

⁶¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hlm.89.

Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh”.

Penelitian Kualitatif menurut para ahli:

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut David Williams mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.⁶²

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *Purposive sample*, yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. Subjek sendiri akan dipilih sesuai dengan yang

⁶²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 6.

diperlukan penulis, karena yang digali di sini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas responden. Istilah subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang memahami informasi mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian⁶³

Dalam metode penelitian kualitatif yang terpenting adalah subjek penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan pada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah staf ataupun karyawan BKKBN.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara *purposive* pada

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm.305.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.85.

penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁶⁵

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara teliti, karena penelitian ini mengkaji tentang “*Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh*”.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif. Maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil

⁶⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.183.

observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview).

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi,⁶⁷

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.225.

⁶⁷Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm.173.

- b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.
- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternatif.
- e. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah ,malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁶⁸ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kegiatan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

E. Sumber Data dalam Penelitian

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.240.

dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.⁶⁹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.⁷⁰ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Tahapan analisis data kualitatif menurut McDrury adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,

⁶⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.22.

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Menurut Bognan & Biklen (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.248.

- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.⁷¹

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Menurut McDrury (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BKKBN Aceh

BKKBN adalah singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN ini adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.⁷² BKKBN terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993, tugas utamanya adalah untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu kementerian/lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”.

Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (dimensi pembangunan), BKKBN berada pada dimensi pembangunan manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan dimensi pembangunan

⁷²BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm. 17

kesehatan serta mental/karakter (revolusi mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.⁷³

1. Sejarah

Pada tahun 1957 organisasi BKKBN dimulai dari suatu organisasi murni berstatus swasta, kemudian menjadi organisasi semi pemerintah pada tahun 1968 kemudian pada tahun 1970 menjadi organisasi resmi pemerintah sebagai pelaksana dan pengelolaan program KB nasional sampai era baru saat ini.

BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993 terbentuk untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dengan tugas pokok BKKBN adalah melanjutkan dan memantapkan program-program KB nasional, merumuskan kebijakan umum pengelolaan program dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara terpadu bersama institusi terkait, unit pelaksana dan pelaksana (BKKBN).⁷⁴

Tujuan dibentuknya BKKBN adalah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.⁷⁵

⁷³BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm. 25

⁷⁴BKKBN, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, (Jakarta: BKKBN, 2005), hlm. 41

⁷⁵BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm.26

2. Visi dan Misi

Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:

- a. Kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
- b. Kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
- c. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan.
- d. Data dan informasi penduduk
- e. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015 - 2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.⁷⁶

⁷⁶BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm.19

Visi BKKBN yaitu “Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”. Sedangkan Misi BKKBN yaitu :

1. Mengutamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB;

⁷⁷BKKBN, *Pedoman Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: BKKBN, 2009), hlm.32

- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f. Penyusunan desain Program KKBPK;
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB.

Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan
- e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB.⁷⁸

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

Ke-6 (enam) sasaran strategis BKKBN 2015-2019 secara langsung terkait dengan tujuan utama BKKBN; sasaran strategis nomor 2, dan 3 terkait secara langsung dengan tujuan utama yaitu menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dan berbagai rincian didalamnya. Sasaran strategis nomor 4 dan 6 terkait secara langsung dengan tujuan lain yaitu peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP. Sasaran strategis nomor 5 terkait dengan tujuan lainnya yaitu meningkatkan pemahaman remaja mengenai

⁷⁸BKKBN, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, (Jakarta: BKKBN, 2015), hlm. 20

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan berbagai rincian didalamnya, sedangkan sasaran strategis nomor 1 secara umum berkaitan dengan tujuan utama poin d.

3. Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang menangani masalah kependudukan khususnya di bidang Keluarga Berencana (KB). Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti program KB antara lain dengan melakukan sosialisasi, pengiklanan melalui beberapa media, bermitra dengan berbagai dinas terkait.

1. Kontribusi BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ibu Yulianti, S.Sos di DP3AP2KB mengenai kontribusi BKKBN Kota Banda Aceh terhadap peningkatan minat masyarakat di beberapa kecamatan di Banda Aceh, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung, sebab kehidupan dan kesejahteraan keluarga akan terhambat, terutama bagi keluarga yang perekonomian dan pendapatannya belum memadai. Dan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, Gampong KB sebagai program nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang berfokus pada keberhasilan suatu

gampong dalam meningkatkan kualitas keluarga yang sejahtera, serta terlibat aktif di dalam berbagai program pembangunan.⁷⁹

Melalui wawancara tersebut dapat diketahui pula bahwa salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KB secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari'at islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya, KB merupakan salah satu upaya pemerintah yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), dengan program untuk membangun keluarga-keluarga bahagia dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang berkualitas. KB dapat dipahami juga sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah dengan cara menganjurkan. setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Bila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Maka hasil peningkatan jumlah peserta program

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Yulianti, S.Sos., Tanggal 28 Desember 2017 di Kantor BKKBN Kota Banda Aceh

Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh terus meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh banyaknya upaya yang dilakukan BKKBN untuk terus menarik minat masyarakat agar dapat ikut serta dalam program ini.⁸⁰

Upaya yang rutin dilakukan sebulan sekali oleh BKKBN di setiap kecamatan yang berada di kota Banda Aceh adalah sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat di tempat-tempat pertemuan seperti di Posyandu dan Puskesmas. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). PLKB adalah bidan yang bekerja dan diberi pelatihan khusus oleh BKKBN bukan hanya membantu dalam kelahiran bayi saja tetapi berfungsi untuk menurunkan tingkat kelahiran bayi, dengan bantuan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN.

PLKB yang terjun ke lapangan sudah melewati proses pelatihan yang baik agar mereka dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Pihak BKKBN juga mempunyai program penyuluhan terhadap PLKB untuk meningkatkan kinerja mereka.

Adapun tugas-tugas dari PLKB adalah:

1. Pendekatan tokoh formal dan informal yaitu suatu kegiatan bidan petugas KB dalam menumbuhkan hubungan kerja sama dengan para tokoh formal seperti Keuchik, Kepala KUA serta para tokoh informal yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang bertujuan untuk mendapat dukungan sekaligus memberikan pengetahuan keterambilan bagi tokoh tersebut.

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Yulianti, S.Sos., Tanggal 28 Desember 2017 di Kantor BKKBN Kota Banda Aceh

2. Melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Menggerakkan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yakni dengan cara melakukan konseling, informasi dan edukasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat yang menjelaskan tentang pengertian KB serta kegunaan alat KB langsung kepada masyarakat pada saat kegiatan penyuluhan.
3. Penyiapan kader dan penumbuhan institusi masyarakat dengan cara pembentukan kader-kader atau pembantu bidan petugas KB di lapangan yang disebut dengan Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dimana badan petugas KB memberikan KIE dan Konseling kepada kader yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat. Dimana konseling adalah proses yang berjalan dengan semua aspek pelayanan Keluarga Berencana. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu konsumen dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya, disamping itu dapat membuat konsumen merasa lebih puas.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh BKKBN untuk terus mengajak masyarakat untuk ikut dalam program KB tersebut adalah dengan cara bermitra dengan beberapa instansi seperti BPS, KODIM, NU, seluruh Rumah Sakit dan juga Dinas Kesehatan, selain itu juga dengan cara mempromosikan program KB melalui media. Media yang digunakan yakni Baliho.⁸¹

⁸¹Data dari Ibu Meutia Julinasari, SE., Tanggal 4 Januari 2017 di Kantor BKKBN Kota Banda Aceh

Dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh BKKBN Kota Banda Aceh tersebut, terbukti bahwa jumlah peserta KB terus meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir (2015-2017). Hal ini dapat dibuktikan melalui data tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Data Pencapaian Jumlah Peserta KB di Kota Banda Aceh.

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	2015	6.503	10.800	86,46
2.	2016	15.203	25.578	89,5
3.	2017	15.732	26.609	93,67

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah peserta KB yang dari tahun-ketahun meningkat drastis dengan target yang telah ditetapkan oleh pihak instansi, dengan cara sosialisasi seperti dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Peresmian Gampong KB di Gampong Mulia

Dengan membuat program Kampung KB, ini merupakan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dibuat oleh pihak BKKBN dan di dukung oleh semua mitra kerjanya.

Seperti dalam gambar berikut yang membuat sosialisasi dengan pihak mitra kerja KODIM.



Gambar 3. Penyuluhan Langsung ke Masyarakat

Berikut dokumentasi sosialisasi BKKBN.



Gambar 4. Aula BKKBN Prov. Aceh



Gambar 5.



Gambar 6. Gampong Kuta Alam

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BKKBN dalam menyampaikan informasi mengenai KB di kota Banda Aceh.

Untuk kendala yang dihadapi BKKBN dalam meningkatkan informasi KB di Kota Banda Aceh pada umumnya tidak menghadapi kendala apapun. Masyarakat kota Banda Aceh khususnya wanita baik yang berusia muda maupun lansia ikut berpartisipasi ber-KB, dengan alasan kebanyakan wanita sekarang ingin menjadi wanita karir, dan tidak ingin hanya duduk dirumah saja. Akan tetapi, peminat ber-KB bagi para laki-laki sangat minim dalam hal kesadaran untuk mengikuti program tersebut dengan alasan bahwasannya KB itu tidak penting bagi laki-laki.

Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh membuktikan bahwasannya pengetahuan dan pola pikirnya sudah maju dan sudah berpikir bahwa program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang

bermanfaat untuk mengatasi masalah penduduk. Daripada itu, pihak BKKBN menganjurkan bagi laki-laki juga ikut ber-KB, alasannya untuk menjaga kesehatan dari kedua pasangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BKKBN sudah berkontribusi besar dalam hal menyajikan informasi-informasi mengenai KB yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah peserta KB secara signifikan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKKBN untuk terus memberikan informasi agar minat masyarakat terus berkembang untuk ikut program KB adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB tersebut salah satunya adalah dengan cara menganjurkan setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.

BKKBN juga melakukan mitra kerja bersama seluruh instansi kesehatan terkait seperti rumah sakit, bidan, puskesmas, baik pemerintah maupun swasta. Dan tidak lepas juga dukungan dari KODIM dalam menggapai kesuksesan program-

program BKKBN. Salah satu teknik penyebarluasan gagasan secara massif dan memiliki jangkauan luas adalah iklan.

2. Untuk kendala yang dihadapi oleh BKKBN di Kota Banda Aceh tentang pentingnya ber-KB hampir sama sekali tidak terkendala dikarenakan masyarakat kota Banda Aceh memahami betapa pentingnya ber-KB.

B. SARAN

Penelitian ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk:

1. Melakukan penelitian tentang kontribusi BKKBN lebih mendalam lagi, tidak hanya dilakukan dalam jangka 3 tahun saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang berdampak kepada analisis tidak akurat tentang berapa besar jumlah peningkatan peserta KB tiap tahunnya.
2. Melakukan penelitian lebih mendalam dengan membandingkan jumlah peningkatan KB setiap tahunnya di seluruh kecamatan yang ada di seluruh kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, 2006, *Kontrasepsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Ghazali, *al-Mustashafa min 'Ilm al-Ushul, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anna, L. K., 2010, *KB Diabaikan, Jumlah Penduduk Melonjak (Online file)*.
- A.R, Munawar, 2016, *Optimalisasi Peran Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV Dan AIDS Terhadap Remaja*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aska, Nindia Destiani, *Perjalanan BKKBN Dulu dan Kini*, artikel dalam *m.kompasiana.com*.
- Ban dan Hawkins, 1999, *Penyuluhan Sumber Daya Manusia*, Jogjakarta: Kanisius.
- BKKBN, 2005, *Badan Kebijakan Program Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2008, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2009, *Pedoman Pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2007, *Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Pendidik Sebaya*, Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2012, *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*, Jakarta: BKKBN.

- BKKBN, 2013, *Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*, Jakarta: BKKBN.
- BKKBN, 2015, *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta: BKKBN.
- Budisantoso, 2008, *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana*, UNDIP: FKM.
- Dasar, Soeroso, 2011, *KB Mati Dikubur Berdiri; Bunga Rampai Tulisan Program Kependudukan dan KB*, cet. 2, Bandung: Corleone Books.
- Data dari Ibu Meutia Julinasari, SE., Tanggal 4 Januari 2017, di Kantor BKKBN Kota Banda Aceh
- Depdikbud, 1994, *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas*, Jakarta: Depdikbud.
- Goldscheider dan Calvin, 1969, *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial (terjemahan)*, California: Universitas California Barkley.
- HR Ahmad, 3/245, 1986, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ada juga hadis pendukung lainnya dari Abu Dawud, al-Nasa'i, dan Ibnu Hibban, dari Ma'qil Ibn Yasar. Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqh Berdasarkan Hadits*, Bandung: Al-Maarif.
- Kamaludiningrat, 2014, *Peran dan Tantangan Orangtua dalam Mendidik Anak Shaleh, Berakhlak dan Berkarakter di Era Globalisasi, Cet. 1*, Yogyakarta: Fapsedu DIY.
- Kawulur, Andre., Salmin Dengo., dan Sonny Rompas, 2015, *Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Administrasi Publik.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Lembaga Demografi UI, 2013, *Dasar-dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Manuaba dan Ida Bagus Gde, 2003, *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi. Edisi 2*, Jakarta: EGC.

- Marcoes, Lies dan Natsir, 1999, *Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar “Harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Cet. 1*, Bandung: Mizan.
- Ma’ruf, Noor Faried, 1983, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma’arif.
- Mas’udi, Masdar F., 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Penderdayaan, cet. 2*, Bandung: Mizan.
- Moertiningsih, Sri dan Omas Bulan, 2013, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Noviawati, Dyah dan Sujiyatini, 2011, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Jogjakarta: Nuha Offset.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan PP 41 tahun 2007.
- Prawiro, Ruslan H., 1981, *Kependudukan (Teori, Fakta, dan Masalah)*, Jakarta: Alumni.
- Prawirohardjo, 2008, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf, 1993, *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan)*, Surabaya: Bina Ilmu.
- QS al-An’am: 151.
- QS al-A’raf: 96.
- QS Bani Isra’il: 31.
- Q.S al-Nisa ayat 9: “Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan keadaan mereka itu...”.

QS al-Thalaq: 2-3.

Saputra, Hendri, 2016, *Persepsi Remaja Terhadap Hubungan Interpersonal Laki-Laki Dan Perempuan (Studi di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Sendjaja dan Sasa Juarsa, 2005, *Teori Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Soenardi, Sabrur R., *Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar*, artikel dalam Majalah Rindang, No. 02, Th. XXXIII, September 2007.

Soenardi, Sabrur R., *Pesan KB dalam Sepotong Sinetron*, majalah Gemari edisi Juni 2008.

Soenardi, Sabrur R., *Sedikit Anak Banyak Rezeki*, artikel di *HU Bernas*, edisi 4 September 2015.

Suci, Euneke Sri Tyas, "Keluarga: Sumber Warisan Nilai, Karakter, dan Kualitas Generasi Berikut," makalah dalam rangka "Hari Keluarga Nasional" (Harganas), di situs Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), www.himpsi.or.id.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Sulistyaningsih, Endah, 2013, *Strategi Sosialisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*, e-Journal Ilmu Komunikasi, 2013, Vol 1.

Sulistyawati, Ari, 2014, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Salemba Medika.

Sulistyo dan Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Suratun, 2008, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Trans Info Media.

Wawancara dengan Ibu Yulianti, S.Sos., Tanggal 28 Desember 2017, di Kantor BKKBN Kota Banda Aceh.

Wayne, Pace, R., dan Deddy Mulyana, 2001, *Komunikasi Organisasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yudohusodo, Siswono, 1998, *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.

Zuhdi, Masjfuk, 1974, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

LAMPIRAN
FOTO DOKUMENTASI BKKBN





FOTO SIDANG MUNAQASYAH





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.157/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2018

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Fajri Chairawati, S. Pd. I., MA(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Arif Ramdan, M.A.(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Fauzan Maulana

NIM/Jurusan : 411307037/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Januari 2018 M

21 Rabi'ul Akhir 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3658/Un.08/FDK.I/PP.00.9/10/2017

24 Oktober 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fauzan Maulana/ 411307037**

Semester/Jurusan : IX / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Alamat sekarang : Kuta Alam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **"Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Meningkatkan Informasi Keluarga (KB) di Kota Banda Aceh"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Juhari



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4633/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2017

18 Desember 2017

Lamp : -

Hal : **Mohon Surat Rekomendasi Penelitian**

Kepada

Yth, **Kepala Badan KESBANGPOL LINMAS dan PB Kota Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fauzan Maulana / 411307037**
Semester/Jurusan : **IX / Komunikasi Penyiaran Islam**
Alamat sekarang : **Kuta Alam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di :

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Banda Aceh

dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "**Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh**". Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar Bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Juhari



PEMERINTAH KOTA Banda Aceh
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242

Website : ppkbbandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

Banda Aceh, 4 Januari 2018

Nomor : 800/ 16 / 2018
Lampiran: :-
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di-

Banda Aceh

Sehubungan surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh, nomor: B. 4633/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2017, tanggal 18 Desember 2017, Perihal Rekomendasi penelitian , atas nama:

N a m a : Fauzan Maulana
N I M : 411307037
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Kontribusi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Meningkatkan Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Banda Aceh.

Bersangkutan benar adanya telah selesai melakukan penelitian, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh,

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan dan seperlunya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh



dr. Media Yulizar, MPH
Nip. 1963716 198910 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fauzan Maulana
2. Tempat / Tgl. Lahir : Banda Aceh /28 Agustus 1994
Kecamatan Kuta Alam Kabupaten/Kota Banda Aceh
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411307037 / KPI
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Sultan Al Kahar No. 16
 - a. Kecamatan : Kuta Alam
 - b. Kabupaten : Banda Aceh
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : fauzanm5@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat SD N 4 Tahun Lulus 2006
10. MTs/SMP/Sederajat SMP N 4 Tahun Lulus 2009
11. MA/SMA/Sederajat SMA N 2 Tahun Lulus 2012
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Adi Putra Abdullah
14. Nama Ibu : Fatmawati
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Jl. Sultan Al Kahar No.16
 - a. Kecamatan : Kuta Alam
 - b. Kabupaten : Banda Aceh
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 9 Januari 2018
Peneliti,

(Fauzan Maulana)